

Kepercayaan Investor Akan Naik

Pelayanan Lengkap, MPP Batam Terbaik di Indonesia

BATAM KOTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, Mal Pelayanan Publik (MPP) Batam merupakan percontohan mal pelayanan terbaik di Indonesia. Selain pelayanan yang komplit, fasilitas penunjang juga bagus dan memberikan kenyamanan.

"Untuk calon investor juga harus dilayani. Walaupun sekadar informasi," ujarnya bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men Pan-RB) Asman Abnur dan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo saat berkunjung ke MPP Batam di Gedung Sumater Promotion

Centre (SPC), Rabu (11/4).

Kegiatan ini juga untuk melihat persiapan sebelum diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada bulan ini. Menurut dia, MPP Batam berbeda dengan daerah lain. Seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi untuk

efisiensi layanan kepada masyarakat. "Dengan adanya pelayanan ini, pasti bisa menyatukan semua. Persoalan investor akan mudah selesai," katanya.

Beberapa waktu lalu, sambungnya, di daerah-daerah lain mengalami permasalahan kepercayaan dari calon investor.

Ke hal 12

Kepercayaan Investor ...

((Dari hal 9

Sehingga pendapatan daerah dan negara turun. Namun dengan adanya MPP, ia yakin berbagai persoalan investasi akan segera selesai. "Apalagi dengan dilakukannya nontunai dan sistem online. Trust (kepercayaan) investor akan naik," kata Rini.

Menpan-RB Asman Abnur menjelaskan, bahwa awalnya di Indonesia, percontohan MPP hanya dilakukan di empat kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bali dan Banyuwangi. Namun karena animo banyak yang ter-

tarik, Batam terpilih menjadi salah pilot project. "Respons paling cepat datang dari Batam. Sekarang di sini jadi contoh. Bahkan, sekarang MPP jadi viral. Sudah 19 daerah antre mau buat MPP," kata Asman.

Dia berharap dengan adanya mal pelayanan ini, perizinan yang memakan waktu hitungan hari, bisa dipersingkat menjadi hitungan jam. Begitu juga perizinan yang berjam-jam agar dipercepat. "Saya yakin, dengan begitu pertumbuhan investasi akan baik," katanya.

Asman juga mengatakan,

MPP Batam dapat membantu meningkatkan peringkat Indonesia terhadap kemudahan bisnis atau Ease Of Doing Business (EODB) dari peringkat 71 ke 40 dunia. "Itu perintah presiden. Dengan transparansi, dan kemudahan, kami yakin bisa tercapai," ujarnya.

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo turut mengapresiasi langkah yang diambil Batam terhadap pembangunan MPP. Ia yakin, pemerintah dapat menyehatkan kualitas pelayanan publik dengan MPP. "Dengan MPP, pasti lebih ringan tugas-

nya," katanya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Gustian Riau mengaku senang mendapat kabar bahwa MPP yang dikelola Pemko Batam menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia. "Pertama merasa senang. Memang sesuai dengan komitmen, beliau (Menpan-RB) akan menghadirkan Menteri BUMN. Untuk melihat apakah ada transaksi tunai atau nontunai," katanya.

Sejalan dengan keinginan Wali Kota Batam Muhammad Rudi, Gustian akan kembali me-

ningkatkan pelayanan jelang peresmian yang akan dilaksanakan April ini oleh Presiden Joko Widodo. "Untuk tanggalnya belum tahu. Yang jelas April ini dijadwalkan," katanya.

Berbagai persiapan juga sudah dilakukan, termasuk komitmen bersama dalam pelayanan yang baik. Saat ini, MPP Kota Batam melayani 427 perizinan dalam 30 instansi yang melayani. "Kami ajak semua yang berkepentingan. Semua kan sudah online, dan waktu yang dibutuhkan tak lagi panjang," ujarnya.

● iwan sahputra

Pengurusan E-KTP Maksimal 24 Jam

BATAM KOTA - Sanksi pemecatan menanti Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang tak bisa melayani pembuatan dokumen kependudukan dalam waktu maksimal 24 jam.

Ancaman itu tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.

Regulasi itu dikeluarkan sebagai respons permintaan Presiden Joko Widodo agar Kemendagri mempercepat proses pembuatan e-KTP. Permintaan ini disampaikan dalam rapat terbatas tentang penataan administrasi kependudukan di Kantor Presiden, Rabu (4/4). "Sampai saat ini kami belum terima. Tapi Batam masih aman," kata Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, kemarin.

Menurut dia, untuk pencetakan kartu identitas tersebut di Batam masih aman. Masyarakat diminta segera mengambil e-KTP di kantor Camat masing-masing.

"Saya sudah turun keempat kecamatan. Masih ada 6.000 KTP yang belum diambil. Ada juga 3.000 KTP di kecamatan yang belum diambil," ujarnya.

Wali Kota Batam Muhammad Rudi, sambungnya, telah menginstruksikan seluruh camat dan lurah untuk pro aktif menyelesaikan e-KTP di akhir Mei. Karena data kependudukan di e-KTP ini dibutuhkan untuk persiapan pemilihan umum presiden dan legislatif 2019 mendatang.

Kepala Disdukcapil Batam

”
Delapan kecamatan sudah selesai. Tugas kecamatan untuk mendistribusikannya ke masyarakat. Kami mengimbau untuk cek ke kantor camatnya masing-masing,

SAID KHAIDAR
Kepala Disdukcapil Batam

Said Khaidar mengaku menyelesaikan pencetakan e-KTP di delapan kecamatan. Di antaranya, Belakangpadang, Bulan, Galang, Nongsa, Sugalung, Batuaji, Sei Beduk, dan Batam Kota.

"Delapan kecamatan sudah selesai. Tugas kecamatan untuk mendistribusikannya ke masyarakat. Kami mengimbau untuk cek ke kantor camatnya masing-masing," kata Said.

Saat ini, sambungnya, petugas Disdukcapil Kota Batam tinggal menyelesaikan pencetakan e-KTP di empat kecamatan, antara lain Sekupang, Batuampar, Bengkong, dan Lubukbaja. Percepatan pencetakan e-KTP ini membantu masyarakat untuk bisa mendapatkan hak pilih pada Pemilu 2019 mendatang. Said optimis target penyelesaian awal Mei bisa tercapai. "Kemarin baru dapat lagi 30 ribu keping blanko. Rencananya untuk Bengkong dan Lubukbaja. Datanya sesuai dengan print ready record," ujarnya.

● **iwansahputra**

Awasi Peredaran Makanan Tak Layak Konsumsi

BATAM KOTA – DPRD Batam meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) melakukan monitoring atau pengawasan terhadap produk yang tidak layak dikonsumsi masyarakat.

Selama ini antara Pemko Batam dan Pemprov kurang koordinasi dan tidak maksimal dalam melakukan pengawasan di lapangan. "Salah satunya adalah koordinasi pengawasan beredarnya sarden di Batam," kata anggota Komisi II DPRD Batam, Uba Ingan Sigalingging dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa (10/4).

Koordinasi ini penting dilakukan karena setiap permasalahan yang terjadi, masyarakat selalu mengadu ke DPRD Batam. Padahal sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan berada di Disperindag provinsi. "Kami ingin ada koordinasi yang baik dalam pengawasan produk-produk makan berbahaya yang beredar di masyarakat," ujarnya.

Selain itu, Uba juga menyoroti



KORAN SINDO BATAM/TEGUH PRIHATNA

Kepala Disperindag Batam Zarefriadi bersama Kapolresta Bareleng Kombes Pol Hengki, sidak di gudang Bulog Batam, beberapa waktu lalu.

rendahnya realisasi anggaran di triwulan pertama. Dari tujuh kegiatan, baru dua program yang sudah berjalan yaitu peningkatan administrasi perkantoran 18,64 persen dan operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrollogian daerah sekitar

14,91 persen.

Sedangkan realisasi kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur, operasional Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), pembinaan dan pengawasan potensi UTTP dan BDKT serta operasi pa-

sar kebutuhan pokok bazar sembako murah masih kosong. "Seharusnya di triwulan pertama ini harus keseluruhan realisasi sekitar 25 persen," katanya.

Kabid Perindustrian dan ESDM Disperindag Batam, M Zen mengatakan program Dekranasda akan mulai berjalan pada akhir April nanti. Pihaknya terus melakukan pembinaan kelompok kerajinan yang lama dan baru. "Dalam melakukan pembinaan, kami tidak memiliki anggaran. Karena anggaran yang ada sangat terbatas sekitar Rp129 juta," kata Zen.

Kabid Perdagangan Disperindag Kota Batam, Adisty menambahkan, pihaknya terus melakukan monitoring produk-produk yang melanggar ketentuan di tengah masyarakat dan berkoordinasi dengan provinsi serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). "Pengawasan sudah tidak di kami lagi. Tapi monitoring selalu kami laksanakan setiap harinya," katanya.

● iwan sahputra

DLH Targetkan 21.000 Objek Retribusi

BATAM KOTA – Pemko Batam tahun ini mulai menerapkan retribusi online (e-retribusi) untuk pengelolaan persampahan. Sejak diterapkan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam menerima banyak kunjungan studi dari daerah lain.

"Kota Pekanbaru, Pangkalpinang, pernah berkunjung ke DLH. Terakhir dari DPRD Kota Samarinda," kata Kepala DLH Kota Batam, Herman Rozie, kemarin.

Kepala Seksi Retribusi, Dwiki Septiawan saat menerima kunjungan menjelaskan bahwa persiapan pelaksanaan e-retribusi sudah dimulai sejak 2016. Dan untuk pengadaan perangkat pendukungnya pada 2017 lalu.

"Untuk pelaksanaan kami mulai di 2018. Tahap awal, diujicobakan di 10 perumahan yang ada di Kecamatan Sekupang sebagai objek retribusi," ujarnya.

Sistemnya yaitu dengan menempelkan kode palang atau barcode di setiap objek retribusi. Pada periode Januari-Februari sedikitnya 1.900 objek retribusi sudah diberlakukan pembayaran secara nontunai.

"Targetnya 21.000 objek retribusi persampahan yang mendapat layanan nontunai di 2018 ini," katanya.

Sebelumnya, Wali Kota Batam Muhammad Rudi memerintahkan agar instansi di ling-



HERMAN ROZIE
Kepala DLH Kota Batam

kungan Pemko Batam memberlakukan sistem elektronik dalam memberikan pelayanan.

Seperti di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah, kecamatan dan kelurahan harus sudah memberikan layanan secara online kepada masyarakat. Sehingga ke depan tidak ada lagi layanan manual kepada masyarakat.

"Saya ingin semuanya berbasis elektronik, sekarang belum semuanya menggunakan elektronik. Terutama rumah sakit, harus bisa

memberikan layanan secara online," kata Rudi.

Jika semua sudah berbasis online, akan memberikan kemudahan kepada masyarakat seperti saat mendaftar. Sehingga tidak perlu hadir secara fisik dan antre.

Diakuinya belum seluruh masyarakat bisa menggunakan fasilitas tersebut. Untuk itu akan ada petugas pembantu yang disiapkan.

Tidak hanya dalam hal mem-

berikan layanan kepada masyarakat saja, untuk urusan internal Pemko Batam pun, Rudi mengharapkan agar antara sistem yang satu dengan yang lain saling terhubung.

"Ini harus kami mulai dari sekarang, sesuai dengan instruksi Pak Presiden. Bahkan Pak Presiden akan membuat regulasi baru menyangkut perizinan. Perubahan ini harus segera dilaksanakan," katanya.

● **iwansahputra**